

Oksidentalisme ; Membuka Kedok Imperialisme Barat

(Studi Politik Imperialisme Belanda Abad 19 dan Awal Abad 20 di Jawa Melalui Kajian Sejarah)

Oleh : Yogi Prana Izza

Abstract

Occidentalism is the opposite of orientalism. If Orientalism serves as a theory of knowledge that is used to study the eastern world (Islam), then the reverse is occidentalism is used to study the Western world. One of the initiators of Occidentalism figure is Hasan Hanafi. Through his Occidentalism theory, this paper seeks to unmask imperialism Dutch politics in Java in the 19th century and the beginning of 20. The result is a political culture that is used Dutch ancient times, same the patterns with contemporary politics in the present era. Thus, it is time, the reality of contemporary addressed wisely. As the purpose of Occidentalism's Hassan Hanafi is to awaken people to the project called "at-turast wa at-tajdid" (Heritage Civilization and Renewal) and the reality of the present (al-waqi ') can be addressed wisely by doing the reconstruction of the heritage of ancient civilizations (at-turast al-Qodim), as well as the position of *al-ana* confirmation before Western culture (*al-Akhar*)

A.PENDAHULUAN

Diantara para pemikir yang sangat serius merancang oksidentalisme sebagai sebuah ilmu adalah Prof Dr Hasan Hanafi. Itulah sebabnya, setiap membicarakan tentang oksidentalisme, tidak bisa dipisahkan dari sosok Hasan Hanafi. Meski sebenarnya masih banyak pemikir-pemikir Muslim lain yang juga punya perhatian terhadap oksidentalisme, seperti Prof Naquib al-Attas, al-Faruqi, Syed Hossen Nasr, Fazlur rahman, Nurkholis Majid, Amin Abdullah, dan lain-lain.

Oksidentalisme sebagai sebuah ilmu diakui banyak cendekiawan, termasuk Hasan Hanafi sendiri, belumlah matang dan masih perlu pengembangan (Hanafi,2000:19). Sejarah oksidentalisme juga belum bisa diuraikan sejajar dengan isme isme lainnya seperti orientalisme yang sudah

mapan sebagai sebuah ilmu. Meski demikian, khalayak menyambut hangat kelahiran oksidentalisme sebagai ilmu yang mendudukan Barat sebagai objek kajian, dan Timur sebagai subyek. Sehingga secara sederhana, oksidentalisme merupakan antitesa dari orientalisme.

Namun demikian, oksidentalisme tidak diharapkan terjebak pada pola orientalisme klasik yang menggunakan pendekatan tendensius, pertentangan, dan kepentingan sepihak untuk masalah imperialisme. Sejak abad ke 16 M sampai menjelang abad ke 19, sekitar 35 persen dunia Timur berada dalam wilayah jajahan kolonialisme Barat, dan seterusnya. Dan dari tahun 1815 sampai tahun 1914, setelah perang Balkan, menjelang Perang Dunia ke I, daerah jajahan meluas menjadi lebih dari 85 persen. Bersamaan dengan itu, keserasian hubungan Barat-Timur, berubah menjadi berubah menjadi hubungan *exploitation* tidak mengenal kearifan (daya,2008: 92).

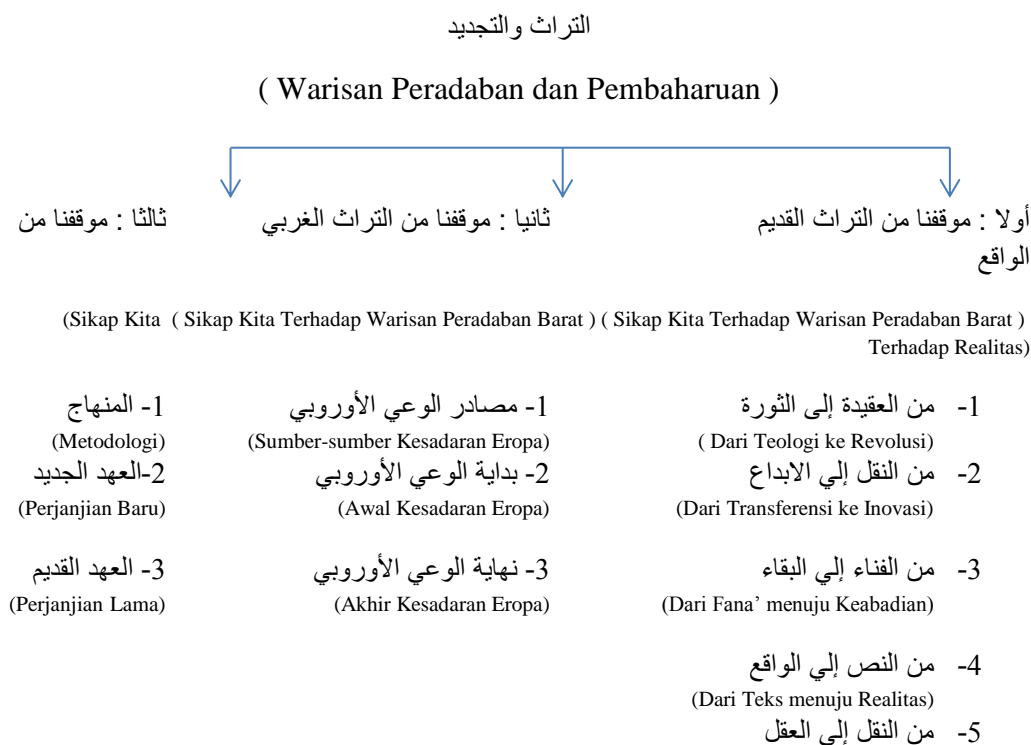
Oksidentalisme lebih fokus mengkaji Barat secara ilmiah dengan langkah awal melalui pendekatan sejarah untuk mengetahui kesadaran Eropa yang bisa diambil manfaatnya untuk kritik atas peradaban masa lalu (*at-Turast al-Qadim*) kita, diambil manfaatnya untuk kepentingan realitas (*al-waq*) kita dan memberi masukan kepada Barat, serta mempertegas sikap Timur (*al-ana*) terhadap Barat (*al-akhar*).

Dengan demikian, oksidentalisme mempunyai tugas menyempurnakan kemerdekaan ; yaitu beralih dari kemerdekaan militer ke kemerdekaan ekonomi, politik, kebudayaan dan yang paling utama adalah kemerdekaan peradaban. Selama Barat masih bercokol dalam hati sebagai sumber pengetahuan dan kerangka rujukan yang diandalkan dalam melakukan evaluasi dan pemahaman, maka kita akan tetap menjadi golongan bawah yang membutuhkan perlindungan (Hanafi,2000: 32).

B.OKSIDENTALISME DAN KAJIAN SEJARAH

1. Oksidentalisme Hassan Hanafi ; Sejarah Sebagai *Starting point*

Oksidentalisme Hasan Hanafi sebenarnya merupakan bagian dari proyek besar “membangkitkan” umat Islam yang disebutnya dengan “*at-Turast wa at-Tajdid*” (Warisan Peradaban dan Pembaharuan). Hasan Hanafi membaginya menjadi tiga agenda atau kategori : pertama, sikap kita terhadap Warisan Peradaban Kuno (*at-turast al-qodim*). Kedua, sikap kita terhadap Warisan Peradaban Barat (*at-Turast al-qharby*) . Dan ketiga, sikap kita terhadap realitas (*al-waqi'*). Setiap agenda, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berintegrasi. Setiap agenda juga memiliki kajian teoritis yang berbeda. Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan tiga agenda beserta kajian teoritis tersebut (Hanafi,2000: 10) :



(Dari Transferensi menuju Rasio)

العقل والطبيعة -6

(Akal dan Alam)

الانسان والتاريخ -7
(Manusia dan Sejarah)

Dari bagan diatas, terlihat bahwa posisi dari oksidentalisme berada ditengah (tahapan kedua) dengan bangunan teoritis mencakup tiga hal : sumber-sumber kesadaran Eropa (Barat), awal kesadaran Eropa, dan akhir dari kesadaran Eropa. Adapun sikap kita terhadap “*At-turast al-Qodim*” bangunan teoritisnya dan pembahasannya lebih banyak karena mengandung aspek historitas yang sangat panjang, kurang lebih dari 1400 dan karena senantiasa hadir dalam kesadaran nasional dan kebudayaan kita. Hanya saja, dua tema terakhir (Akal dan Alam, Manusia dan Sejarah) merupakan tema yang “hilang” dari kesadaran kebangsaan (Hanafi,2000: 10). Barulah kemudian sikap kita terhadap realitas ditempatkan pada tahap ketiga.

Hal ini sebenarnya memberikan penjelasan bahwa proyek intelektual hasan Hanafi adalah suatu upaya penyikapan terhadap realitas kekinian dengan melakukan rekonstruksi terhadap warisan peradaban kuno (*at-turast al-qodim*), penegasan posisi dihadapan kebudayaan Barat (oksidentalisme) dan sikap kritis terhadap realitas kekinian.

Maksud dari penegasan posisi oksidentalisme adalah mempertegas posisi *al-ana* (kebudayaan masyarakat Timur, Islam) dihadapan *al-akhar* (kebudayaan masyarakat Barat). Karena westernisasi (*at-taghrib*) yang melanda umat Islam khususnya telah memindahkan posisi *al-ana* ke *al-akhar* sehingga jatuh pada peradaban ganda (Hanafi,2000: 32). Lalu, bagaimana caranya ?.

Menurut Hassan Hanafi, jika orientalisme mengkaji Timur (Asia/Afrika dan Islam) dalam sudut pandang Barat, maka oksidentalisme mengkaji Barat

(Eropa/Amerika) dalam sudut pandang Timur (Hanafi,2000: 27). Dan untuk menentukan Barat, dalam konteks oksidentalisme, bukanlah geografis melainkan kebudayaan. Peradaban Barat (*western culture*) yang dimaksud disini, terutama meliputi bidang-bidang Pemikiran Barat, Filsafat Barat, Sosiologi Barat, Antropologi Barat, Sejarah Barat, Agama-agama Barat, Tradisi-tradisi Barat, mulai dari masa awal perkembangan sampai dengan masa kini. Demikian juga meliputi Geografi Barat terdiri dari : Eropa secara keseluruhan, Amerika, Kanada dan Australia. Sebagai “lawanannya”, yaitu Timur yang meliputi : Afrika, Cina dan India beserta segenap bagian wilayah-wilayah masing-masing.

Oksidentalisme tidak dimaksudkan untuk menjelek-jelekan citra Barat. Karena menurut Hassan Hanafi, oksidentalisme juga tidak dimaksudkan untuk menguasai, tetapi melepaskan diri dari dominasi Barat (Hanafi,2000: 27). Oksidentalisme bersifat objektif-ilmiah, dan diharapkan tidak menjadi suatu bentuk reaksioner terhadap hegemoni kebudayaan Barat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, keinginan melepaskan diri juga tidak lepas dari sebab yang menimbulkan reaksi.

Dalam konteks ini, oksidentalisme harus pula dimaknai sebagai awal dimulainya masa-masa kreasi inovatif kelompok kebudayaan Timur untuk menemukan rumusan teoritik yang bersifat mandiri untuk memahami realitas, berbeda dengan orientalisme klasik. Perbedaan fundamental antara oksidentalisme sekarang dan orientalisme klasik adalah terletak pada momen sejarah (Hanafi,2000: 26):

1. Orientalisme lama muncul ditengah ekspansi imperialisme Eropa. Sedangkan oksidentalisme lahir pada masa kemunduran pasca gerakan kemerdekaan Arab.
2. Orientalisme klasik muncul dengan membawa revolusi paradigma riset ilmiah atau aliran politik yang menjadi kecenderungan utama diabad ke-19 terutama positivisme, historisisme, saintisme, rasialisme, dan

nasionalisme. Sedangkan oksidentalisme lahir ditengah ideologi paradigma penelitian yang sama sekali berbeda, seperti metode linguistik, metode analisis eksperimentasi subsistem dan ideologi tanah air.

3. Oreintalisme sekarang telah berubah bentuknya dan dilanjutkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan terutama antropologi peradaban dan sosiologi kebudayaan. Sementara oksidentalisme masih terlalu dini dan belum mengembangkan bentuknya.
4. Orientalisme klasik tidak mengambil posisi netral tetapi banyak didominasi paradigma yang merefleksikan struktur kesadaran Eropa yang terbentuk peradaban modernnya. Paradigma tersebut antara lain, metode historis, analitis, proyektif, dan pengaruh dan keterpengaruhannya. Sementara kesadaran peneliti oksidentalisme, lebih dekat kepada posisi netral.

Tentu saja apa yang terurai diatas dalam tataran normatif. Karena mengambil posisi netral tentu saja tidak mudah, dan itu pula yang disadari oleh Hasan Hanafi bahwa pengkajian tradisi Barat oleh non Barat menyimpan potensi subyektifitas yang berlebihan. Oleh karena itu, tujuan oksidentalisme ini harus didasarkan pada maksud memberikan sumbangsih kepada khazanah peradaban Barat, bukan dimaksudkan untuk menentang semua pemikiran ilmiah Barat, sehingga tercipta pondasi yang kuat bagi suatu perspektif ilmiah (Hanafi,2000: 29).

Sejarah sebagai *Starting Point* Oksidentalisme

Langkah awal yang dilakukan Hasan Hanafi dalam membuka wacana oksidentalisme adalah melalui pendekatan historis. Satu persatu Hasan Hanafi mengurai perkembangan sejarah filsafat barat yang menjadi ruh kesadaran kebudayaan Eropa (Barat). Seperti yang juga dilakukan Foucault dalam menelusuri sejarah kegilaan (atau juga sejarah penjara dan sejarah seksualitaas

). Hasan Hanafi mengungkapkan wacana-wacana yang tertindas (atau ditindas) dan disingkirkan dari ladang sejarah kebudayaan Barat.

Pendekatan sejarah yang dipakai oleh Hasan Hanafi tidak luput dari pemahamannya atas konsep waktu ; masa lampau, masa depan dan sekarang. Masa lampau adalah representasi dari *at-turast al-qodim* (warisan peradaban kuno), masa depan adalah representasi dari *at-turast al-gharby* (warisan peradaban Barat), dan masa sekarang adalah *al-waqi'* (realitas masa kini). Dari sebuah kesadaran sejarah, maka pertama, akan lahir sikap kritis terhadap warisan peradaban kuno (agenda pertama). Kedua, kritis terhadap warisan peradaban/tradisi Barat (agenda kedua). Ketiga, kritis terhadap realitas dengan mengubah dan mengembangkannya, bukan menjauhinya (agenda ketiga) (Hanafi,2000: 65).

Dengan membaca dan memahami sejarah Barat, melalui kaca mata Timur, akan tercipta dialektika sejarah yang melahirkan kebenaran filosofis yang otonom-independen dari sejarah itu sendiri (Hanafi,2004: 178). Hasan Hanafi mengamati dan menginventarisir bahwa khazanah intelektual Islam, banyak sekali yang tidak ada pendekatannya, seperti ilmu-ilmu filsafat Islam, sehingga menurutnya tidak ditemukan sejarah dunia dan manusia (Hanafi,2004: 134). Demikian juga keterbatasan sejarah ushuluddin, sehingga ulama kalam, tidak menemukan urgensi mempertautkan Allah dengan sejarah, dengan bumi, dan dengan kehidupan kaum muslimin. Padahal, sejarah ditransformasikan dari tindakan praksis menuju persepsi, dari luar ke dalam, dan dari realitas menuju kesadaran (Hanafi,2004: 115).

2. Analisis Semiotika dalam Sejarah

Pada umumnya, analisis semiotika digunakan sebagai pisau analisis bidang sastra dan komunikasi. Namun disini, analisis semiotika (semiologi) Roland Barthes digunakan untuk menganalisa data sejarah. Setidaknya ada tiga

alasan utama yang melatar belakangi penggunaan semiotika Roland Barthes disini. Pertama, semiotika dalam konsep Barthes berkaitan erat dengan mitologi dan ideologi.

Menurut Barthes (dalam Sobur,2006 : 71), “mitos” adalah operasi ideologi yang berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Barthes memahami ideologi sebagai kesadaran palsu yang membuat orang hidup di dalam dunia yang imajiner dan ideal, meski realitas hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian. Ideologi ada selama kebudayaan ada, dan itulah sebabnya Barthes berbicara tentang konotasi sebagai suatu ekspresi budaya. Kebudayaan mewujudkan dirinya di dalam teks-teks dan, dengan demikian, ideologi pun mewujudkan dirinya melalui berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-penanda penting, seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain (Sobur,2006: 77).

Alasan kedua penggunaan analisis Barthes dalam sejarah adalah pembaca atau analis untuk mengkaji sejarah secara sinkronik maupun diakronik. Artinya, secara sinkronik, makna terantuk pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di titik tersebut. Sementara diakronik analisis Barthes memungkinkan untuk melihat kapan, di mana, dan dalam lingkungan apa sebuah sistem mitos digunakan. Atas dasar tersebut diatas, titik sejarah atau data tentang kolonialisme Belanda di Jawa pada abad 19 dan awal abad 20, akan dilihat secara sinkronik dan diakronik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Data-data di dalam sejarah tersebut dianalisis secara leksia dengan menggunakan kode-kode pembacaan dari Rolan Barthes. Kode-kode itu antara lain adalah kode hermeneutika dan gnomik.

Kode hermeneutika berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Sedangkan kode gnomik

disebut juga kode kultural. Kode ini merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Menurut Barthes, realisme tradisional didefinisi oleh acuan ke apa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau subbudaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasi yang di atasnya para penulis bertumpu.

Alasan ketiga adalah Ronald Barthes meneguhkan dirinya sebagai seorang yang beraliran strukturalis, artinya, tidak terpaku pada kajian bidang tertentu saja. Menurutnya, ilmu bisa diaplikasikan pada bidang apa saja. Oleh karenanya, teori Barthes dapat pula diterapkan dalam kajian sejarah.

C.POLITIK KOLONIAL BELANDA DI JAWA

Intisari Undang-Undang Bumi tahun 1870 oleh Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda adalah mengubah fungsi Nusantra Indonesia sebagai tanah jajahan. Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah (raw material resources) dan sebagai pasar (market) dari industrinya. Dengan demikian, melalui UU Bumi 1870 M, Keradjaan Protestan Belanda memperkenalkan pemilik modal asing Barat atau investor untuk menanamkan modalnya di Nusantara Indonesia (Suryanegara,2012:278).

1. POLITIK PENCITRAAN DAN PELESTARIAN PENJAJAHAN

Hakikat dari Politik Pencitraan terletak pada sumber pesan (komunikator), karenanya analisis yang digunakan adalah ‘analisis kontrol’. Analisis kontrol yang dimaksud terkait dengan pengendalian pada pesan-pesan yang disampaikan, dan banyak berhubungan dengan sumber pesan itu sendiri dalam membangun manajemen pencitraan yang terbaik baik seseorang. Oleh sebab itu, hal yang tidak bisa dilepaskan dari ‘politik pencitraan’ itu sendiri adalah ‘strategi’ pencitraan yang dibangun.

Idealisme Warna Kulit Putih

Politik pencitraan kolonial Belanda adalah unggulnya ras kulit putih dibandingkan dengan ras kulit coklat atau kehitam-hitaman (Indonesia). Strategi yang digunakan adalah “pendekatan ilmiah” empiris. Karena bukti-bukti penelitian empiris adalah landasan kebenaran yang sulit dipatahkan. Sehingga akan memudahkan untuk membangun pola pikir publik. Salah satu “bukti ilmiah” yang dipolitisir untuk pencitraan adalah ditemukannya fosil manusia purba di trinitil Jawa Tengah dengan nama *phitecan tropus erektus* (manusia kera yang berdiri tegak).

Penemuan kerangka manusia purba ini sebenarnya tidak lengkap, namun disimpulkan bahwa di Trinil, Jawa Tengah yang tidak seberapa jauh dari candi Hindu Prambanan dan candi Budha Boroboedoer, terdapat "manusia purba" yang disebutnya sebagai *Pithecanthropus Erectus* (Manusia kera yang tegak). Di Mojokerto, Jawa Timur, di wilayah pusat keradjaan Hindoe Madjapahit, disebutnya Mojokertensis. Diikuti dengan penemuan Wajakensis disekitar Kediri Selatan, Jawa Timur sebagai wilayah Keradjaan Kediri Airlangga dan Praboe Djajabaja. Apakah tempat penemuan tersebut hanya secara kebetulan ? Apa pula tujuan penelitian tersebut ?.

Memang secara historis sukar ditemukan faktanya. Namun, bila suatu penelitian mendapat legalitas dari pemerintah kolonial Belanda dapat dipastikan terkait dengan upaya pelestarian penjajahan. Abad ke -19 M sebagai *the Age of Imperlaim*, penjajah merasa perlu memperoleh pembenaran secara ilmiah, alasan dan tindakan penjajahannya (Suryanegara,2012:296).

Dr Paryana Suryadipura (1994:189-194) menjelaskan bahwa hasil penelitian para pakar arkeologi Barat menyatakan bahwa ukuran otak manusia purba Asia-Afrika jauh lebih kecil daripada manusia purba Eropa :

Plesianthropus Transvalensis dari Afrika Selatan berukuran 45-600 cc. *Pithecanthropus Erectus* dari Trinil Jawa Tengah berukuran 700-900 cc. *Sinanthropus Pekinensis* dari Cina berukuran 900-1200 cc. *Eoanthropus Dawsoni* dari Inggris berukuran 1300-1400 cc dan *Homo Neanderthalesis* Jerman Barat, berukuran 1100-1500 cc. Sehingga bisa disimpulkan bahwa manusia purba Eropa jauh lebih maju daripada manusia purba Asia Afrika.

Dari sini timbul pertanyaan, mengapa seni arsitektur Asia Afrika jauh lebih unggul daripada Eropa ?. Contohnya, Mesir, Afrika Utara, Piramida adalah mahakarya teknik arsitektur yang tinggi, dan Cina dengan Tembok Raksasa Cina. Tidak ada negara-negara Eropa yang mampu menandinginya. Tembok Berlin pun juga tidak mampu menandingi seni dan tingkat teknik arsitektur Tembok Raksasa Cina (Suryanegara,2012:I: 297).

Kontradiksi penemuan fakta-fakta sejarah diatas sejatinya dapat diambil benang merah terkait politik pencitraan Belanda untuk kepentingan “legalitas” penjajahan di Indonesia. Karena idealisme warna kulit putih di Indonesia juga dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Untuk mengerti ini, perlu diingat masalah klasifikasi rasial pada abad kesembilan belas, di mana *cultuurstelsel* adalah landasan kuat proses legalisasi klasifikasi rasial di Hindia Belanda. J.C Baud, salah satu pembentuk dan pelaksana *cultuurstelsel*, menegaskan bahwa bahasa, warna kulit, agama, moral, keturunan, ingatan historis, dan semuanya adalah berbeda antara orang-orang Belanda dan orang-orang Jawa (Yulianto, 2007: 59-60).

Orang Belanda adalah penguasa dan orang Jawa adalah yang dikuasai. Salah satu penegasan atas politik rasial ini dilakukan oleh Gubernur Jendral J.J Rochusen yang mempertegas perbedaan biner antara penjajah dan yang dijajah dengan mengagung-agungkan keindahan kulit putih dan superioritas moral serta intelektual bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit coklat.

Apa yang disampaikan oleh Joseph Rudyard Kipling (1865–1936), penyair yang suka merasakan imperialisme, patut untuk dicermati karena selain menjajah disebut *white man's burden* (beban bagi orang kulit putih), ia juga menyebut jajahan Asia-Afrika sebagai *Half devil and half child* (setengah setan dan setengah anak-anak). Sehingga *send forth the best ye breed* (maka kirimkanlah generasi keturunanmu yang terbaik). Dengan tujuan *on fluttered fold and wild* (menjaga kawanan liar dan buas)¹.

Idealisme warna kulit putih sebagai superior juga disampaikan oleh RA Kartini kepada Zeehandelaar (Suryanegara,1998: 180) :

kerap kali aku bertemu kulit putih, yang sekali-kali bukan orang bodoh, malahan pikirannya cerdas, tetapi congkaknya bukan main, tiada tahan. Hal itu menyakitkan hatiku bukan main, dan terlalu banyak kali menyampaikan perasaanya kepada kami, bahwa kami orang Jawa sebenarnya bukan manusia. Bagaimana mungkin orang Belanda akan kami (orang jawa) kasih sayangi, bila kami diperlakukan secara demikian. Cinta akan membangkitkan cinta,tapi penghinaan selama-lamanya tiada akan membangkitkan rasa cinta (23 Agustus 1900).

Demikianlah, sampai abad ke sembilan belas, asumsi dari klasifikasi rasial ini menjadi legal. Secara garis besar, sadar atau tidak sadar, mungkin latar belakang inilah yang menjadi dasar penerimaan konotasi kulit putih lebih

¹ . Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Sukarno atas pembelaanya didepan Hakim Kolonial yang menyinggung *white man burden* (Suryanegara,2012:297). Puisi lengkapnya : Take up the White Man's burden—Send forth the best ye breed—Go send your sons to exile-To serve your captives' need-To wait in heavy harness-On fluttered folk and wild—Your new-caught, sullen peoples,Half devil and half child-Take up the White Man's burden In patience to abide-To veil the threat of terror-And check the show of pride;By open speech and simple-An hundred times made plain-To seek another's profit -And work another's gain-Take up the White Man's burden—And reap his old reward:The blame of those ye better-The hate of those ye guard—The cry of hosts ye humour (Ah slowly) to the light:"Why brought ye us from bondage,"Our loved Egyptian night?"Take up the White Man's burden-Have done with childish days-The lightly proffered laurel,The easy, ungrudged praise.Comes now, to search your manhood Through all the thankless years,Cold-edged with dear-bought wisdom,The judgment of your peers!(<http://historymatters.gmu.edu>, diakses tanggal 19-12-2014).

agung daripada warna kulit lain. Bahkan hingga abad 21 sekarang ini, fenomena idealisme kulit putih masih terlihat jelas seperti pada ajang-ajang kecantikan di Indonesia maupun di dunia.

2. POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL; DISKRIMINASI DAN DIKOTOMI ILMU

Pemerintah kolonial Belanda tentu saja tidak hanya “menyerang pikiran” (Ghozul Fikr) melalui pencitraan, tetapi juga berupaya melanggengkan penjajahan melalui politik pendidikan. Karena pendidikan adalah tempat strategis yang dapat memunculkan kesadaran diri atas siapa dirinya (*al-ana*) kemudian mengambil sikap terhadap orang lain (*al-Akhar*) yang berinteraksi dengannya.

Diskriminasi Sistem Pendidikan ; Melebarkan Kesenjangan Strata Sosial

Di Jawa, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat signifikan. Disamping sebagai lembaga pendidikan, ketika penjajahan muncul, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan semata, tapi menurut Harry J Benda (dalam Suryanegara,1998: 18) juga berubah menjadi a centre of anti- Dutch sentiment (pusat pembangkit anti Belanda). Setidaknya, menurut Clifford Geertz (pada abad 19 di Jawa dan Sumatera ada empat kali pemberontakan santri yang besar yang disebut juga Holy War (Perang Sabil). Pertama, Perang Cirebon (1802-1806). Kedua, Perang Diponegoro (1825-1830) atau juga disebut Perang Jawa Tengah. Ketiga, Perang Padi di Sumatera Barat (1821-1838) dan keempat, di Aceh (1873-1908) yang disebut-sebut sebagai perang terlama.

Realitas inilah yang membuat kolonial Belanda berpikir keras untuk memperlemah peran pesantren yang jumlahnya cukup banyak. Prof Dr Sartono Kartodidjo (1984: 222-223) menyebut jumlah pesantren di Jawa pada abad ke

19 M sekitar 300 pesantren. Beberapa diantara yang terkenal adalah pesantren Lengkon dan Punjul di Cirebon, pesantren Daya Luhur di Tegal, pesantren Brangkal di Bagelen, pesantren Tegalsari dan Bajarsari di Madiun, dan pesantren Sida Cerma di Surabaya.

Namun data lain menyebutkan bahwa di Jawa pada abad 19 hingga berakhirnya penjajahan Belanda pada tahun 1900-1942 terdapat ribuan pesantren. Karena di Jawa Timur saja terdapat banyak pesantren-pesantren besar, diantaranya pesantren Tremas di Pacitan didirikan tahun 1852, pesantren Langitan Tuban didirikan tahun 1852, pesantren Jampes Kediri didirikan tahun 1886, pesantren Guluk-guluk Sumenep didirikan tahun 1887, dan dua pesantren yang tidak diketahui pasti kapan berdirinya yaitu Pademangan Bangkalan dan Maskumambang Gresik (Suyono: 2005).

Oleh karena itu, sebagai tandingan lembaga pendidikan Islam ini, didirikanlah sekolah-sekolah kolonial Belanda yang terbagi menjadi tiga tahapan studi dan kejuruan (Mestoko,1986: 97) :

1. Lager Onderwijs (Pendidikan Rendah)
2. Middelbaar Onderwijs (Pendidikan Lanjutan)
3. Hooger Onderwijs (Pendidikan Tinggi)
4. Vakonderwijs (Pendidikan Kejuruan)

Pada tingkat sekolah dasar, tidak semua pribumi dapat mengenyam pendidikan. Prioritas hanya diperuntukkan untuk anak bangsawan. Selain itu, sekolah hanya didirikan untuk keperluan tenaga kerja. Karena apabila jumlah tenaga kerja sudah terpenuhi maka sekolah tersebut ditutup (Suryanegara, 2012:I: 308).

Hal yang sama terjadi pada tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA), dan juga pada Perguruan Tinggi. Jumlah muridnya sangat terbatas. Di bidang kesehatan didirikan STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische)

pada tahun 1903 dengan lama studi 3 tahun dan mendapat gelar Dokter Jawa atau Dokter Boemipoetra. Asal sekolahnya dari SD-HIS (Sekolah India Belanda) atau SMP-MULO. Namun kemudian dirubah menjadi NIAS (Nederlandsch Indische Arsten School) tahun 1913 M dengan lama studi 7 tahun. Kewenangan kerjanya hanya sebagai juru Cacar (Mestoko,1986:98).

Jumlah dana pendidikan juga dialokasikan berbeda. Untuk Europesche Lager School (ELS) yang jumlah muridnya hanya 2.500 disediakan dana f. 2.677.000. Sedangkan untuk Hollansch Indische School (HIS) dengan murid 162.000, disediakan dana f. 1399.000. Selain itu, HIS dan ELS diizinkan bangunan sekolahnya tembok permanen, sementara itu, Volks School (Sekolah Desa) berbentuk setengah tembok. Murid-murid HIS dan ELS diizinkan memakai sepatu dan pantolan, sekolah rakyat tidak dibenarkan memakai sepatu. Guru-gurunya pun memakai pakaian yang berbeda (Suryanegara,2012:I:308).

Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan dijadikan media penciptaan stratifikasi sosial yang feodalistis. Keturunan darah menjadi penghambat bagi rakyat biasa untuk bisa berinteraksi dengan kaum bangsawan. Demikian sebaliknya, kaum bangsawan tidak bisa berinteraksi dengan rakyat biasa. Sehingga melalui pendidikan, kalangan bangsawan dan raja diputuskan hubungan dekatnya dengan rakyat. Sebaliknya, anak bangsawan dan raja dipererat hubungannya dengan anak penjajah (Suryanegara,2012:I: 308).

Dikotomi Ilmu ; Menjauhkan Konsep Integrasi Ilmu dalam Islam

Kesenjangan pendidikan anak bangsawan, anak sudagar dan rakyat biasa tentu saja berdampak pada dikotomi ilmu dalam Islam. Karena para kiai umumnya lebih dekat dengan rakyat. Sistem pendidikan pesantren bersifat tidak elitis. Hal inilah yang membuat anak-anak Islam memilih Madrasah atau Pondok Pesantren.

Politik Belanda ini sepertinya berhasil, dan ditingkatkan dengan sistem kontrol yang ketat dengan membentuk badan-badan khusus untuk mengawasi pendidikan Islam dan menerbitkan berbagai peraturan untuk mengawasi umat Islam yang bersifat diskriminatif, seperti penerbitan Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) dan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Ordonansi Guru mewajibkan guru-guru agama memiliki surat izin mengajar yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga tidak setiap orang, meski seorang ahli agama sekalipun, dapat mengajar dilembaga-lembaga pendidikan. Adapun Ordonansi Sekolah liar adalah peraturan yang dikeluarkan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah (Rahim,2011:50-51).

Pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan peraturan yang disebut sebagai *netral agama*. Peraturan ini digunakan untuk sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam. Seperti yang dinyatakan pada hukum Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2) bahwa pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah pribumi, pada HIS dan MULO diberikan pelajaran agama Islam, secara sukarela sekali dalam seminggu bagi murid-murid yang berminat atas persetujuan orang tuanya (Daulay,2001: 49).

Adapun lembaga yang dibentuk Pemerintah Belanda untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi, adalah Departemen *van Onderwijst en Eerendinst* untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah umum dan Departemen *van Binnenlandsche Zaken* untuk pendidikan Islam dilembaga pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah kolonial yang memarjinalkan aspirasi dan kepentingan kalangan muslim menjadi cikal

bakal terciptanya dualitas pengaturan negara terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan kepentingan kalangan muslim .

Fakta-fakta sejarah diatas menemukan relevansinya pada realitas pendidikan Islam kontemporer yang sangat kental dengan dikotomi antara Ilmu agama dan Ilmu umum. Para cendikiawan dan juga filosof Muslim dahulu sudah berupaya mengklasifikasikan ilmu. Al-Ghozali misalnya, mengklasifikasi ilmu menjadi dua; ilmu relegius (*al-ulum as-syar'iyah*) dan ilmu intelektual (*al-ulum al-aqliyah*). Dari basis ini kemudian muncul kategori ilmu *fardh ain* dan *Fardh kifayah* (Bakar,1998: 234-235).

Para pemikir kontemporer juga berupaya menyadarkan umat Islam melalui “islamisasi ilmu “ diantara mereka adalah seorang oksidentalisi dari Malaysia, Prof Dr Naquib al-Attas. Selama ini Al-Attas berkonsentrasi pada epistemologi pendidikan Islam, dan berupaya mewujudkan pemikirannya melalui pendidiran universitas yang kurikulumnya dirancang sendiri, yaitu ISTAC (*The International Institute of Islamic Thought and Civilization*) yang mengkaji bidang Filsafat, Peradaban dan Sains.

3. POLITIK IDENTITAS ; SEJARAH LAMA YANG TERULANG ?

Istilah Politik Identitas sebenarnya konsep baru dalam kajian ilmu politik. Nama lain dari politik identitas adalah biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional diWina pada 1994 (Abdilah,2002: 16).

Sejarah Politik Identitas Belanda

Jika dilacak dalam sejarah, Indonesia meski dengan kemajemukannya, adalah masyarakat yang secara umum dapat menerima proses asimilasi. Sebagai contoh, umat Islam di Jawa sebagai warga pribumi (Indonesia) menerima warga pendatang seperti Cina. Hubungan umat Islam Cirebon dengan Cina pada abad ke -15, dibuktikan dalam kisah Carita Purwaka Caruban Nagari, bahwa Panglima Wai Ping dan Laksamana Te Bo berserta pengikutnya mendirikan mercu suar di bukit Gunung Jati. Menurut, Drs Aca (1972, dalam Suryanegara,1998:245) yang dimaksud dengan Laksamana Te Bo adalah Laksamana Ceng Ho (Muslim) dalam perjalanan muhibanya ke Asia Tenggara.

Hubungan baik Cina dan Umat Islam berlangsung baik hingga abad ke 18. Victor Purcell (dalam Suryanegara,1998:245) mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan Belanda terhadap Cina (1740) telah menumbuhkan hubungan baik antara Cina dan Umat Islam yang menyebabkan beberapa orang Cina masuk Islam, sehingga terjadi kerja sama dalam menyerang benteng-benteng Belanda.

Realitas inilah yang kemudian melahirkan kebijakan untuk memisahkan asimilasi antara Cina dengan Pribumi. Melalui politik Identitas, provokasi dilakukan Belanda sehingga berhasil melalukan adu domba antara warga pribumi dan Cina sebagai pendatang. Seperti Kasus anti Cina di Surakarta pada tahun 1911 yang ditunjang oleh Tentara Mangkunegaran (Suryanegara,1998: 247).

Sehingga dalam sejarahnya, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan hukum berdasarkan tiga golongan sebagaimana termuat pada pasal 163 dalam *Indische Staatsregeling* tahun 1917, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1.Golongan Eropa (menggunakan hukum Eropa)
2. Golongan Timur Asing (menggunakan hukumnya sendiri)
- 3.Golongan Bumi Putera (menggunakan hukum adat)

Pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putera sudah tentu menimbulkan masalah. Karena Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya, maupun agamanya. Paling tidak, dengan adanya ketentuan tertulis seperti dijelaskan terdahulu menimbulkan bias negatif terhadap hukum agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, termasuk di Jawa.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, ketiga pengelompokan hukum diatas didasari atas studi para ilmuwan Belanda tentang hukum apa yang sesuai dengan daerah jajahannya. Dari sinilah ditemukan bahwa hukum adat, secara prinsipil bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang terjadi di Jawa, terutama mengenai bidang kewarisan dan tanah. Meski secara umum, kaidah-kaidah hukum Islam tentang perkawinan diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Namun penggunaan hukum adat dipakai dalam kerangka politik *divide at impera* karena hukum adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak, sementara Hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan (www.yusril.ihzamahendra.com).

Sepertinya, era politik kontemporer saat ini menunjukkan sebuah realitas yang hampir sama dengan politik identitas Belanda yang bersifat “memecah belah”. Otonomi daerah telah memunculkan “raja-raja kecil” yang berbasis kesukuan. Istilah asli putera daerah yang merujuk pada suku asli sebuah wilayah, acapkali digunakan sebagai untuk memobilisasi massa atau “alat” mendulang suara dalam sebuah pilkada. Dengan makna lain, selaian “putera daerah” tidak berhak menduduki jabatan. Sehingga kontradiktif dengan konsep wawasan nusantara.

Secara makro, politik identitas dapat dengan jelas terlihat dalam berbagai simbol-simbol dan jargon politik dewasa ini. Ada yang merujuk pada ideologi, agama, maupun kesukuan. Apakah ini indikasi bahwa politik identitas

Belanda sudah menjadi “budaya” yang belum terhapuskan ? atukah ini sejarah yang terulang kembali ? . Agaknya, perlu direnungkan kembali.

D.PENUTUP

Oksidentalisme Hasan Hanafi adalah satu dari tiga agenda proyek besar untuk kebangkitan umat yang disebut dengan “*at-turast wa at-tajdid*” (Warisan Peradaban dan Pembaharuan). Dengan oksidentalisme, realitas kekinian (*al-Waqi*) dapat disikapi dengan bijak yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap warisan peradaban kuno (*at-turast al-qodim*), penegasan posisi *al-ana* dihadapan kebudayaan Barat (*al-Akhar*).

Langkah oksidentalisme bisa dimulai dengan pendekatan sejarah, karena dengan membaca dan memahami sejarah Barat, melalui kaca mata Timur, akan tercipta dialektika sejarah yang melahirkan kebenaran filosofis yang otonom-independen dari sejarah itu sendiri.

Untuk menjaga netralitas kajian, oksidentalisme tidak boleh didasarkan untuk memperburuk citra Barat, bukan tidak pula untuk menentang semua pemikiran ilmiah Barat, namun dimaksudkan memberikan sumbangsih kepada khazanah peradaban Barat melalui perspektif ilmiah. Meski harus diakui bahwa oksidentalisme ini juga bermuara pada penegasan sikap Timur terhadap Barat sehingga tidak tercipta “mitos” superioritas Barat yang abadi.

Oleh karena itu, melalui analisis Roland Barthes, data-data sejarah tentang kolonialisme Belanda di Jawa pada abad 19 hingga awal abad 20, diurai untuk menyingkap “kebenaran” yang tersembunyi dibalik sebuah teks atau data. Dan hasilnya, adalah Belanda menggunakan politik-politik untuk melestarikan penjajahan, seperti politik pencitraan, politik pendidikan yang diskriminatif dan menghasilkan dikotomi ilmu, dan politik identitas untuk memecah belah.

Hal menarik dari kajian terhadap politik-politik tersebut adalah ditemukannya pola-pola yang sama dalam berpolitik di era kontemporer sekarang ini. Sehingga, sudah saatnya, realitas kekinian disikapi dengan bijak. Karena, boleh jadi penjajahan tersebut masih bercokol dihati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Malang.
- Bakar, Osman, 1998, *Hierarki Ilmu, Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, terjm Purwanto, Bandung: Mizan.
- Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Daya, Burhanuddin 1990, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam; Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta :Tiara Wacana.
- Hanafi, Hasan, 2000, *Madza Ya'ni Ilmu al-Istighrob*, Kairo: Kitab Qodhoya Islamiyyah Mu'ashirah.
- _____, 2004, *Dari Rasionalisme ke Empirisme*, Terjm Miftah Yaqin, Yogyakarta: LKIS.
- _____, 2004, *Dari Teosentris ke Antroposentris*, Terjm Miftah Yaqin, Yogyakarta: LKIS.
- Kartodirjo, Sartono, 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Maksum, 1999, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Mestoko, Sumarsono, 1986, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka.

Muliawan, Jasa Ungguh 2005, *Pendidikan Islam Integratif ; Upaya Mengintegrasikan Kembali dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos.

Sobur, Alex, 2006, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryadipura, Paryana, 1994, *Manusia dengan Atomnya dalam Keadaan Sehat dan Sakit : Antropo-Biologi Berdasarkan Metafisika*, Jakarta : Bumi Aksara.

Suryanegara, Ahmad Mansur, 1998, *Menemukan Sejarah : Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.

_____, 1998, *Menemukan Sejarah : Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.

_____, 2012, *Api Sejarah 2*, Cet V, Bandung: Salamadani.

Suryanegara, Ahmad Mansur, 2012, *Api Sejarah I*, Cet V, Bandung: Salamadani.

Suwito, Fauzan, 2004, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara, Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M*, Bandung: Angkasa.

www.yusril.ihzamahrenra.com (diakses tanggal 17 Desember 2014).

Yulianto, Vissia Ita, 2007, *Pesona Barat di Indonesia: Analisis Kritis-Historis tentang Kesadaran Warna Kulit di Indonesia*, Yogyakarta: Jalasutra.